

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN E-LITIGATION DI PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG MENURUT PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG (PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



Oleh :

ABDUL ARKAN
11720714852

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021 M/1442 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN E-LITIGATION DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG MENMURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK”** yang ditulis oleh:

Nama : ABDUL ARKAN
 NIM : 11720714852
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2021

Pembimbing Skripsi

Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19720505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan e-litigation di Pengadilan Negeri Bangkinang menurut peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik**, yang ditulis oleh :

Nama : Abdul Arkan
 NIM : 11720714852
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 1 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : -

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H. Maghfirah, M.Ag

Sekretaris
Basir, SH., MH

Penguji I
Rudiadi, SH., MH

Penguji II
Dr. Muhammad Darwis.SH, MH

(Handwritten signatures of the examiners)



Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

ABSTRAK

Abdul Arkan, (2021): Pelaksanaan *e-Litigation* di Pengadilan Negeri Bangkinang Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam perkembangannya, proses penyelesaian perkara di persidangan tidak selalu dilakukan dengan cara konvensional yakni para pihak secara langsung datang ke persidangan akan tetapi dapat dilakukan secara online. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan agar menjadi lebih efektif dan efisien, oleh karenanya ketua Mahkamah Agung menetapkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik pada tanggal 06 Agustus 2019 sebagai penyempurnaan dari peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik khususnya yang terkait dengan tata cara persidangan secara Elektronik. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui pelaksanaan e-litigasi menurut PERMA Nomor 1 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangkinang, 2) mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan *e-Litigation* di Pengadilan Negeri Bangkinang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu kualitatif. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer, dan sumber data sekunder. Sumber data primer di peroleh dari observasi ke tempat penelitian, dan wawancara secara langsung kepada informan di tempat penelitian. Sedangkan sumber data sekunder peneliti peroleh dari buku-buku, jurnal, dan internet, metode pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara, dan observasi. Dan teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah teknik *purposive sampling*. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Negeri Bangkinang belum diterapkan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, hal itu dapat dilihat dari tahap kesimpulan dan pemeriksaan saksi yang dilakukan Pengadilan Negeri Bangkinang dilakukan secara offline disebabkan beberapa pertimbangan, sedangkan pelaksanaan persidangan yang lainnya sudah diterapkan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yaitu secara online (e-litigasi). Dan kendala yang dihadapi selama persidangan yaitu sistem yang belum baik, dapat dilihat dari SDM Tinya, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Kata Kunci: E-Litigasi, Pelaksanaan *e-Litigasi*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur tak hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan Ilmu pengetahuan ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program strata satu Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi penulis adalah: **“Pelaksanaan *E-Litigation* di Pengadilan Negeri Bangkinang Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminstrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.”**

Proses penulisan dan penelitian skripsi ini sangat banyak bantuan dari pihak-pihak yang luar biasa hebatnya, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah membalasnya dengan lipat ganda atas semua kebaikan dan bantuan, baik itu berbentuk materi dan non materi.

Kemudian dengan segala kerendahan hati penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang terdalam kepada:

1. Kedua orang tua, Abah Habiburrahman.S.Pd dan Ibu Sulasmah,S.Pd yang saya sayangi terimakasih atas dukungan moril maupun materil yang engkau berikan selama ini sehingga sangat berjasa dalam kelancaran peyusunan dalam penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli , M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil dekan I, II, dan III.
4. Bapak Firdaus, SH. MH. selaku ketua program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muslim, S.Ag. SH. M.hum. selaku dosen pembimbing proposal sekaligus skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan yang sangat luar biasa, meluangkan waktu dan tenaga, memberikan ilmu dan motivasi serta membantu menyelesaikan skripsi penulis.
6. Bapak-bapak dan Ibuk-ibuk seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis.
7. Kepada abang saya Muhammad Muhshi, dan adek- adek saya, Sayyid Sulhabib, Aisyah Siti Habsah dan Nur Khairani Izzi yang saya sayangi.
8. Bapak Ade Faris Fahrullah, M.Ag selaku penasehat Akademis yang memberikan dorongan dan motivasi selama masa perkuliahan.
9. Terimakasih kepada bapak Dr. Peri Pirmansyah, SH. MH dan Dr. Nur Hidayat, S.H, M.H. Yang telah memberikan motivasi, masukan dan arahan terhadap penulis.
10. Kepada Putri Sakina, S.E yang telah mendorong penulis dan berjasa dalam memberikan arahan, motivasi serta membantu penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Panitera Muda Hukum Bapak Doni Saputra, SH.MH. dan Hakim Ibuk Ratna Dewi Darimi, SH.MH yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian di Pengadilan Negeri Bangkinang.
12. Teman-teman seperjuangan Fikram Rasyid, Ariady, Ahmad Sukri, Rival tembok, Tika tembok, Adit tobian, Muhajir vanhauten, Icing guru dan nama yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua pembaca dan terkhususnya untuk penulis sendiri. Penulisan juga tidak luput dari kesalahan dan kelemahan penulis, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semua itu didasarkan keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh sebab itu mohon kritik dan saran yang membangun sehingga kedepan jauh lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 23 Mei 2021
Penulis

ABDUL ARKAN
NIM: 11720714852



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Teknik Analisis Data	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	19
A. Sejarah singkat pengadilan bangkinang	19
B. Letak Geografis dan Demografis Pengadilan Negeri Bangkinang.....	20
C. Visi, Misi Pengadilan Negeri Bangkinang	21
D. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangkinag.....	24
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Pengertian pelaksanaan	29
B. Pengertian media elektronik (e-litigasi)	30
C. Mekanisme (e-litigasi).....	32
D. Pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-litigasi) menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persdiangan d pengadilan secara elektronik.....	34

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Penelitian Terdahulu	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pelaksanaan <i>e-litigation</i> di Pengadilan Negeri Bangkinang menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik	46
B. Kendala Dalam Pelaksanaa <i>e-Litigation</i> di Pengadilan Negeri Bangkinang.....	53
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Hasil Temuan	51
-----------	--------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Organisasi Pengadilan Negeri Kelas	24
-----------------------------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni penyelesaian sengketa secara litigasi (di dalam pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Dalam Hukum Acara Perdata ada 2 (dua) macam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan yaitu perkara gugatan (*contentiousa*) yakni perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih, dan perkara permohonan (*voluntaire*) yakni perkara yang didalamnya tidak terdapat sengketa dan hanya bersifat sepihak untuk kepentingan pemohon.¹ Secara formal, apabila gugatan akan disidangkan di pengadilan, maka surat gugatan harus diajukan ke pengadilan dan berwenang. Dalam mengajukan gugatan, pihak penggugat harus mendaftarkannya setelah biaya perkara dilunasi. Setelah terdaftar, gugatan diberi nomor perkara dan selanjutnya diajukan kepada Ketua Pengadilan.²

Setelah Ketua Pengadilan menerima gugatan, selanjutnya ia akan menunjuk hakim yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Pada hari sidang yang telah ditentukan apabila satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya. Kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil lagi dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi. Berikut

¹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 41.

² *Ibid*, h. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ilustrasi perkara di pengadilan:³ Pada hari sidang pertama, majelis hakim akan membuka persidangan dan menyatakan “sidang dibuka dan terbuka untuk umum”.

Apabila pengugat dan tergugat hadir, hakim akan menanyakan identitas para pihak baik pengugat dan tergugat. Pada kesempatan tersebut, hakim akan mengupayakan perdamaian, dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk berdamai dan menetapkan sidang berikutnya tanpa dipanggil lagi. Apabila para pihak berdamai, maka akan dibuat akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan yang telah berkekuatan tetap. Akan tetapi, jika perdamaian tidak tercapai dan tidak ada perubahan gugatan, maka persidangan berikutnya adalah pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan, hakim memberi kesempatan kepada tergugat untuk menyusun jawaban pada hari sidang berikutnya, dan memerintahkan untuk hadir pada sidang berikutnya tanpa pemanggilan lagi.

Selanjutnya setelah jawaban dibacakan, pengugat diberi kesempatan untuk menyusun replik dan menetapkan hari sidang berikutnya untuk pengajuan replik, dan para pihak diperintahkan hadir tanpa pemanggilan lagi. Sidang selanjutnya adalah pembacaan replik oleh tergugat, kemudian sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada tergugat menyusun duplik, dan memerintahkan para pihak untuk hadir pada sidang berikutnya dengan agenda pengajuan duplik tanpa dipanggil lagi. Setelah duplik dibacakan oleh tergugat, maka pada kesempatan berikutnya adalah pengajuan bukti-bukti untuk

³ Zainal Arifin, *Hukum Acara Perdata DiIndonesia*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), h. 24-26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memperkuat dalil-dalil, dan sidang ditunda untuk memberi kesempatan pengugat menyiapkan daftar alat bukti dan memerintahkan para pihak untuk hadir pada sidang berikutnya dengan agenda pengajuan alat bukti dari pengugat tanpa pemanggilan ulang.

Setelah pengugat mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya tergugat diberi kesempatan untuk menyusun dan mengajukan bukti-bukti pada sidang berikutnya, dan memerintahkan para pihak untuk hadir pada sidang berikutnya dengan agenda pengajuan alat-alat bukti oleh tergugat, tanpa pemanggilan lagi. Setelah proses pembuktian dari para pihak selesai, dilanjutkan dengan penyusunan kesimpulan, dan sidang ditunda berikutnya untuk memberi kesempatan para pihak mengajukan kesimpulan dan memerintahkan para pihak untuk hadir dalam sidang berikutnya tanpa dipanggil lagi. Selanjutnya para pihak menyampaikan kesimpulannya, dan sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada majelis hakim untuk musyawarah guna menjatuhkan putusan.

Dalam sidang berikutnya, Ketua Majelis Hakim membacakan putusannya dan bagi para pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum. Berdasarkan ilustrasi pemeriksaan di atas, maka hal-hal yang harus dilakukan oleh para hakim terkait tugas pokoknya adalah sebagai berikut:⁴ Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara- perkara (melaksanakan persidangan) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

⁴ *Ibid*, h. 35-38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mengonstatir atau membuktikan benar atau tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian, dan mengkualifikasi peristiwa/fakta yang terbukti, dengan menilai peristiwa dan hubungan hukumnya, dalam hal ini menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir yang selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan. Ketua Majelis Hakim membimbing dan memprakarsai jalannya persidangan serta mengawasi terhadap pembuatan berita acara persidangan (BAP).

Majelis hakim menyusun konsep putusan/penetapan perkara yang ditanganinya, yang bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam berita cara persidangan (BAP) dan berdasarkan BAP dibuat putusan/penetapan dan minutasi berkas perkara. Dengan demikian, proses pemeriksaan gugatan di Pengadilan berlangsung secara kontradiktor (*contradictoir*) yaitu memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil-dalil pengugat dan sebaliknya pengugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat.

Proses persidangan tersebut dilakukan setelah para pihak dipanggil secara sah oleh juru sita untuk datang menghadap dan menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Setelah pemeriksaan sengketa antara dua pihak atau lebih tersebut diselesaikan dari awal sampai akhir, maka pengadilan akan mengeluarkan putusana atas gugatan tersebut.⁵

⁵ *Ibid*, h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam perkembangannya, proses penyelesaian perkara di persidangan tidak selalu dilakukan dengan cara konvensional yakni para pihak secara langsung datang ke persidangan akan tetapi dapat dilakukan secara online. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan agar menjadi lebih efektif dan efisien, oleh karenanya ketua Mahkamah Agung menetapkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik pada tanggal 06 Agustus 2019 sebagai penyempurnaan dari peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik khususnya yang terkait dengan tata cara persidangan secara Elektronik.

Dengan peraturan tersebut nantinya proses peradilan dapat dilakukan secara online melalui *e-litigation*. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dengan aplikasi *e-litigation* merupakan kelanjutan dari *e-court* yang di berlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara.

Pada sistem *e-court* sebelumnya, sistem elektronik atau online hanya di lakukan pada administrasi perkara atau pendaftaran. Selain itu, sistem elektronik juga tidak hanya di berlakukan pada pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara dan biaya pemanggilan tetapi di berlakukan juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalam pertukaran dokumen jawab-jawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik, *e-litigation* juga memperluas cakupan pengguna data peradilan secara elektronik.

Pemberlakuan *e-litigation* untuk persidangan di tingkat pertama juga diikuti dengan pemanfaatan *e-court* untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan *e-litigation* pada tingkat pertama.

E-Litigation secara singkat adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk tatap muka dan datang ke kantor pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu sendiri.⁶ Teknisnya Para Pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara persidangan di depan Laptop atau Personal Computer-nya sendiri.

E-Litigation itu sendiri merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program induk bernama *e-court* (*Electronic Court*). Namun hal yang perlu digarisbawahi bahwa berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak semua perkara di pengadilan dapat dilakukan secara *e-Litigation* namun baru secara limitatif diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi gugatan, gugatan sederhana, dan bantahan permohonan.⁷

Namun demikian, setelah berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, ternyata dalam prakteknya Pengadilan Negeri Bangkinang telah membuka layanan *e-litigation* tersebut. Saat ini masih bertahap pelaksanaannya

⁶ Gelombang Online dalam Perkembangan Hukum. 2019. www.mahkamahagung.go.id

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-E-Litigation-oleh--rafli-f-achmad/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

di Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang, hal ini dikarenakan adanya kendala pemasangan sistem layanan jaringan tersebut serta kemampuan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan aplikasi tersebut. Disamping itu, perlu di galakkan lagi sosialisasi penggunaan aplikasi *e-litigation* tersebut di kalangan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dan juga masyarakat pengguna layanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan penggunaan aplikasi tersebut dalam proses administrasi pendaftaran perkara dan persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang.

Sejak lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019) yang diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2019 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA Nomor 3 Tahun 2018).⁸

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini menyempurnakan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga saat ini tidak hanya pendaftaran perkara saja yang dapat dilakukan secara online atau dikenal dengan sebutan *e-court* namun persidangan juga dapat dilakukan secara elektronik yaitu *e-litigation*. Peraturan mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik merupakan jawaban Mahkamah Agung terhadap tuntutan perkembangan jaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi

⁸ Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Thun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894, Pasal 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien⁹ serta upaya untuk mendukung kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia.

Pengadilan Bangkinang telah melaksanakan persidangan secara online, persidangan online ini sebagai bentuk social distancing untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19. Persidangan secara online dilakukan setelah pihak Kejaksaan Negeri Kampar berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Bangkinang dan Lembaga Pemasyarakatan atau lapas kelas II A, Persidangan telah dilaksanakan pada hari Selasa 24/3/2020 sidang yang di gelar terkait kasus perdata dengan terdakwa Hamid Nur dan kawan-kawan, saat persidangan berlangsung Majelis Hakim yang mengadili perkara itu berada di ruangan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang bersama penasehat hukum tergugat yang mana Jaksa Penuntut Umum berada di kantor Kejaksaan Negeri Kampar sedangkan terdakwa berada di ruang sidang lain. Pihak Kejaksaan Negeri Kampar mengupayakan agar seluruh persidangan digelar secara online selama pandemi Covid-19.¹⁰

Berangkat dari latar belakang yang telah peneliti paparkan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi masalah antara lain:

- a. Pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Negeri Bangkinang.
- b. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Negeri Bangkinang.

⁹ Ibid, Bagian Menimbang.

¹⁰ <https://www.cakaplah.com/berita/baca/51525/2020/03/25/pengadilan-negeri-bangkinang-sidangkan-perkara-secara-online#sthash.luXOGlPo.dpbs>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Faktor penyebab pemberlakuan e-litigasi di Pengadilan Negeri Bangkinang.
- d. Peraturan MA (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka disini penulis perlu mengkaji untuk dijadikan penelitian dengan judul: **PELAKSANAAN *E-LITIGATION* DIPENGADILAN NEGERI BANGKINANG MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini maka penulis membatasi dan memfokuskan penelitian ini tentang pelaksanaa e-litigation di pengadilan Negeri Bangkinang menurut perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *e-litigation* di pengadilan Negeri Bangkinang menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik?
2. Apa kendala dalam pelaksanaa *e-litigation* di Pengadilan Negeri Bangkinang?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan *e-litigation* menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan *e-litigation* di Pengadilan Negeri Bangkinang

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum S.H pada program strata satu S1 jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Secara teoritis
 - 1) Untuk menambah referensi, bahan literature atau pustaka, khususnya dalam memahami pelaksanaan *e-Litigation* menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
 - 2) Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian untuk penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan *e-Litigation*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

c. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi Pengadilan Bangkinang dalam pelaksanaan *e-litigation* di Pengadilan Bangkinang secara Elektronik.

E. Kerangka Teori



F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan¹¹. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang nyata pada pelaksanaan *e-litigation* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan maksud dan tujuan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *e-litigation* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang dilanjutkan dengan menemukan solusi dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Sedangkan sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.¹²

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cetakan ke- 4, Jakarta ; sinar Grafika, 2008 h. 12.

¹² *Ibid*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bangkinang, dimana titik pengambilan data penelitian tentang pelaksanaan *e-litigation* di Pengadilan Negeri Bangkinang ini yang beralamat di Jl. Letnan Boyak No. 77, Langgini Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat dalam penelitian ini. Berbeda dengan ilmu alam yang bertujuan memperoleh teori-teori kasual yang memungkinkan dilakukan prediksi dan pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektivis harus berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami¹³. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah para Majelis Hakim dan Panitera Hukum Muda di Pengadilan Negeri Bangkinang serta pihak yang berperkara yang menggunakan e-litigasi.

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Negeri Bangkinang.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tertier:

¹³ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), Cet Ke-7, H, 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan¹⁴ penelitian yang bersumber dari informan yang berkaitan dengan penelitian melalui observasi dan wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya¹⁵ yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

5. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Informan penelitian terbagi dua yaitu:¹⁶

- a. Informan Kunci (*Key Informan*)

Informan kunci merupakan orang yang ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademis, budayawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 105.

¹⁵ *Ibid*, h. 106.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan informan kunci dalam penelitian ini adalah ketua hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Yaitu Ibu Riska Widianana, SH, MH. Hal ini dikarenakan ketua hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut adalah informan yang mengetahui dan memahami pelaksanaan serta kendala persidangan yang ada di Pengadilan Negeri Bnagkinang.

b. Informan Tambahan

Yaitu siapa saja yang ditentukan diwilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang di teliti.

Informan tambahan pada penelitian ini adalah hakim yang menjalankan sidang, panitera muda hukum dan pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Bangkinag.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yakni sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.¹⁷ dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung

¹⁷ Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.

- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data yang terkumpul di analisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang di peroleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh kemudian di catat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknis analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang diperoleh, serta hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data.

Data yang disajikan berbentuk narasi untuk kemudahan mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan *e-litigation* di Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

¹⁸ Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 53.

Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis menggambarkan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan lokasi penelitian yang terdiri dari, sejarah Pengadilan Negeri Bangkinang, profil Pengadilan Negeri Bangkinang, dan sejarah Pengadilan Negeri Bangkinang,

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan teori tentang: pengertian pelaksanaan, pengertian *e-Litigation*, mekanisme persidangan e-litigasi, pelaksanaan persidangan e-litigasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang bagaimanakah pelaksanaan *e-Litigation* menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang



Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan apa saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaan *e- Litigation* di Pengadilan Negeri Bangkinang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Bangkinang

Pengadilan Negeri Bangkinang merupakan meliputi wilayah hukumnya Kabupaten Kampar yang masih dibawah oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau dengan kata lain wilayah Kabupaten Kampar termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.¹⁹

Pengadilan Negeri Bangkinang berdiri pada tanggal 26 Desember 1976. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan hukum serta meningkatnya pembangunan disegala bidang, maka Pemerintahan Kabupaten Kampar berkesimpulan bahwa di Kabupaten Kampar sudah sangat dibutuhkan lembaga peradilan yaitu Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Kampar yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kampar.

Selanjutnya pemerintahan Kabupaten Kampar mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait diantaranya Kejaksaan Negeri Bangkinang dan POLRES Kampar yang pada saat itu sudah berdiri di Kabupaten Kampar serta pemangku hukum adat Kampar yang lebih dikenal dengan Pemangku Adat Limo Koto. Maka pemerintahan daerah Kabupaten Kampar mengusulkan kepada pemerintahan pusat, Departemen Kehakiman pada waktu itu agar wilayah Kabupaten Kampar dapat didirikan atau dibentuk Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Kampar.

¹⁹ Dokumen Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah Pengadilan Pusat melakukan penelitian dari segala instansi, tingkat kejahatan pidana dan sengketa-sengketa perdata, sengketa tanah adat yang tidak bisa diselesaikan serta adat, maka pemerintahan pusat berkesimpulan bahwa di Kabupaten Kampar sudah sepantasnya didirikan Pengadilan Negeri.

Pada tanggal 26 Desember 1976 dibentuklah atau didirikanlah Pengadilan Negeri di wilayah Kabupaten Kampar yang diberi nama Pengadilan Negeri Bangkinang kelas II B. Setelah itu Pengadilan Negeri Bangkinang dengan sarana dan prasarannya serta tenaga khusus yang ada bekerja semestinya sehingga di Kabupaten Kampar sudah dapat berjalan dengan semestinya.

Diketahui di Negara Republik Indonesia terjadi perkembangan disegala bidang, sehingga Kabupaten Kampar berdasarkan pemekarannya terpecah menjadi tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, yang mana wilayah hukumnya masih dibawah Pengadilan Negeri Bangkinang.

Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 9 Agustus 2004 telah berdiri dan terbentuk Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Rokan Hulu, dan sekarang Pengadilan Negeri Bangkinang membawahi Kabupaten Kampar sendiri.

B. Letak Geografis Dan Demografis Pengadilan Negeri Bangkinang.

Pada awalnya gedung Pengadilan Negeri Bangkinang bertempat di Jalan Prof. M. Yamin, SH Bangkinang, pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Bangkinang yang terletak di Jalan Letnan Boyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bangkinang dengan luas tanah 8.280 M2 dengan luas bangunan 624 M2, bangunan terdiri dari dua lantai dan berpilar sebanyak 4 (empat) buah.

Setelah empat tahun kemudian tepatnya pada tahun 1983 berdasarkan DIP Nomor. 60/XIII/3/1983 tanggal 11 Maret 1983 tahun anggaran 1982/1983 Pengadilan Negeri Bangkinang mendapat tambahan gedung untuk ruang arsip, ruang tahanan laki-laki dan wanita serta ruang hukum.

Kemudian pada tahun 2007 Pengadilan Negeri Bangkinang mendapat pula proyek rehabilitasi gedung Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang seluas 624 M2 berdasarkan DIPA No.0364-0/005-01.0/IV/07 tanggal 31 Desember 2007.²⁰

C. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Bangkinang

Dalam menyatukan persepsi untuk mencapai tujuan dan program, Pengadilan Negeri Bangkinang menyusun suatu pola kerangka berpikir guna memacu pelaksanaan program yang akan dijalankan, persepsi tersebut juga digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai barometer kinerja dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Negeri Bangkinang yang tersusun dalam bentuk Visi dan Misi. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan program dalam bentuk tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

²⁰ www.pn-bangkinang.go.id, diakses pada Tanggal 07 Maret 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Visi Pengadilan

Dalam menyatukan persepsi untuk mencapai tujuan dan program, Pengadilan Negeri Bangkinang menyusun suatu pola kerangka berpikir guna memacu pelaksanaan program yang akan dijalankan, persepsi tersebut juga digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai barometer kinerja dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Negeri Bangkinang yang tersusun dalam bentuk Visi dan Misi.

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan program dalam bentuk tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi Pengadilan Negeri Bangkinang mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Sebagaimana visi Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Maka Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung telah mempunyai visi yang selaras dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangkinang yang Agung.

2. Misi Pengadilan

Untuk mencapai visi diatas, perlu disinergikan dengan misi Pengadilan Negeri Bangkinang, Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagaimana Misi Mahkamah Agung yaitu :

- a. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan Peradilan.

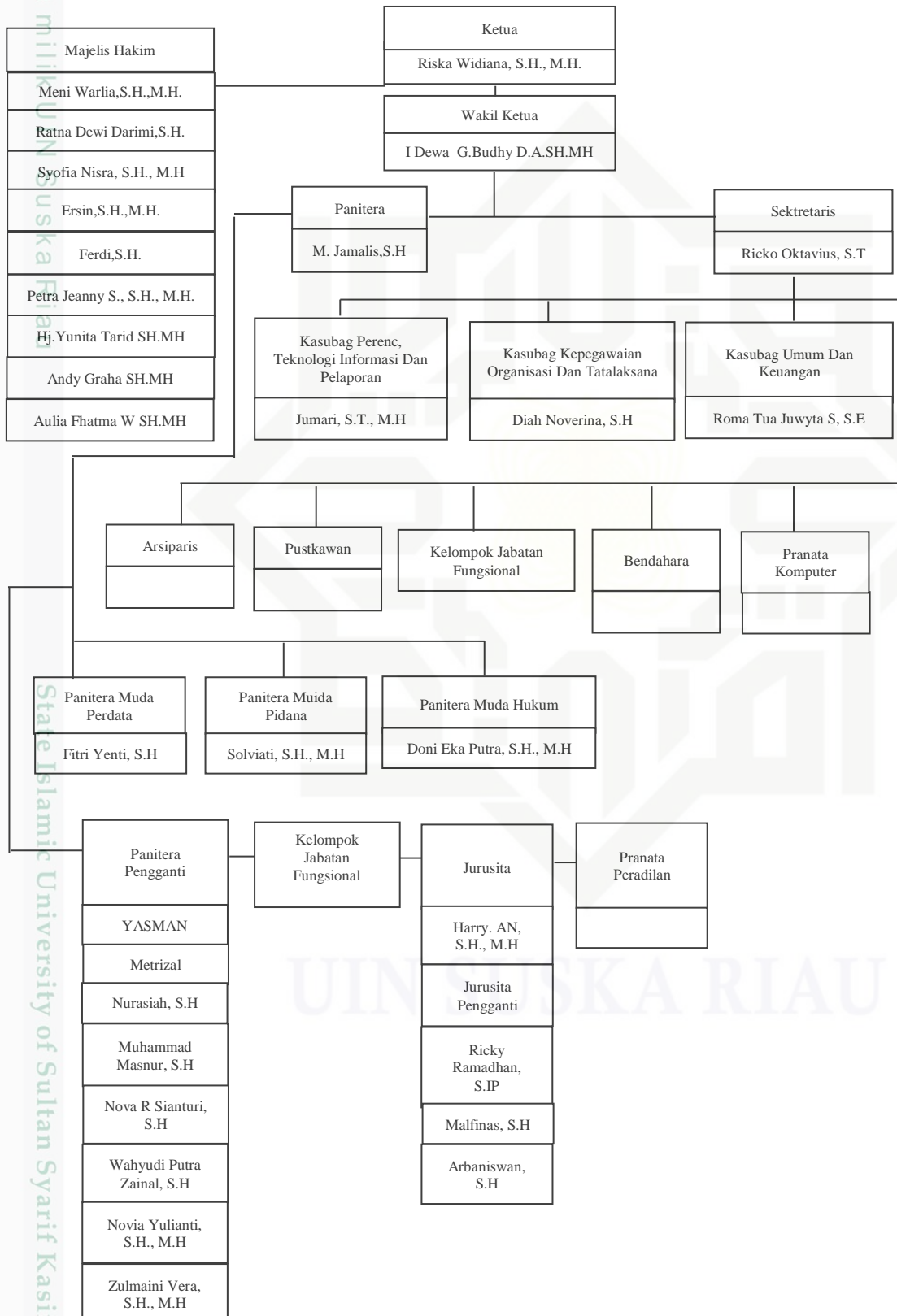
Untuk menselaraskan misi Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Mahkamah Agung diatas, maka misi Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangkinang
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dengan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan dukungan teknologi informasi.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Bangkinang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bangkinang dengan mewujudkan keterbukaan informasi publik, putusan berkualitas dan pelayanan prima berbasis teknologi infomasi.

UIN SUSKA RIAU

D. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangkinang

Gambar 3.1
Bagan Organisasi Pengadilan Negeri Kelas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan tugas-tugas pokok dari struktur Pengadilan Negeri Bangkinang adalah :

1. Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan.

Menetapkan atau menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan, menetapkan biaya perkara, dalam hal ini penggugat atau tergugat tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara preode, membagi perkara gugatan dan permohonan kepada hakim-hakim untuk disidangkan, memerintah Jurusita untuk melakukan pemanggilan melaksanakan somasi, berwenang menanggguhkan Eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal gugatan perlawanan dan juga permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung.

Memerintahakan pemimpin serta mengawasi Eksekusi dengan ketentuan yang berlaku, menetapkan biaya Jurusita, biaya Eksekusi, menetapkan pelaksanaan Lelang, tempat pelaksanaan Lelang, kantor lelang Negara sebagai pelaksanaan lelang, melaksanakan putusan serta merta, menyelesaikan permohonan kewarganegaraan, dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua dengan ketentuan yang ada.

2. Tugas dan Wewenang Wakil Ketua Pengadilan

Melaksanakan tugas Ketua apabila ketua berhalangan, melaksanakan tugas yang dilegasiakan oleh Ketua Pengadilan kepadanya, dalam hal ini Ketua mendelegasikan kepada Hakim secara merata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tugas dan Wewenang Hakim

Menetapkan hari sidang, menetapkan sita jaminan, bertanggung jawab atas kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya, mengemukakan pendapat dalam bermusyawarah, menyiapkan memorandum naskah putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.

4. Tugas dan Wewenang Panitera

Membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggung jawab atas penulisan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepanitraan, mengatur tugas panitera, panitera muda dan panitera pengganti, menerima serta membuat daftar semua perkara, membuat salinan putusan, memberitahukan putusan Verstek, membuat akta, melegalisir surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, mengirimkan berkas perkara yang dimohon Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK).

5. Tugas dan Wewenang Wakil Panitera

Membantu Hakim mencatat jalannya persidangan, membantu Panitera untuk langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan atau tugas yang didelegasikan kepadanya.

6. Tugas dan Wewenang Panitera Muda Perdata

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang di persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas yang masih berjalan dan urusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain yang berhubungan dengan perdata, memberi register pada setiap nomor perkara yang diterima di kepaniteraan, menyerahkan salinan putusan kepada pihak-pihak yang berperkara, menyiapkan berkas banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), menyerahkan Arsip kepada kepanitera Muda Hukum.

7. Tugas dan Wewenang Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum membantu Hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, mengkaji, mengumpulkan dan mengolah data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip, berkas perkara daftar notaris, penasehat hukum, dan pemohon Kewarganegaraan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Tugas dan Wewenang Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan, mengetik putusan, melaporkan kepada panitera muda untuk dicatat dalam buku register perkara baik penunda hari sidang ataupun perkara-perkara yang sudah putus, berikut amar putusannya, menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda perdata bila sudah selesai diminutasi, panitera pengganti membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

9. Tugas dan Wewenang Jurusita

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan. Ketua sidang dan Panitera, melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua sidang dan Panitera,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, ketua sidang dan Panitera, menyampaikan pengumuman, tugas -tugas, proses-proses dan pemberitahuan putusan menurut cara-cara berdasarkan undang-undang, melakukan penyitaaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita berdasrkan surat-surat yang sah apabila menyita tanah, membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara laian kepada Badan Petanahan Nasional bila terjadi penyitaan tanah (Peraturan pemerintah. 10/196.jo Pasal 199 HR), melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acara, melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

A. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana dilakukannya, kapan waktu dimulai dan berakhirnya, dan bagaimana cara pelaksanaannya.

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan), yaitu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan.²¹

Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²²

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/elektronik>, 2016

²² Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 70.

B. Pengertian Media Elektronik (*e-Litigasi*)

Wilbur Schramm dalam buku Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi mendefinisikan media sebagai teknologi informasi yang dapat digunakan dalam pengajaran. Secara spesifiknya yang dimaksud dengan media adalah alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran seperti buku, film, video, kaset, slide, dan sebagainya.²³

Sedangkan elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika. Jadi, Media Elektronik adalah seluruh alat media yang memakai energi elektromeknis bagi pemakai untuk mengakses kontennya.²⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa Media Elektronik adalah semua informasi atau data yang diciptakan, didistribusikan serta diakses menggunakan bentuk elektronik.

E-Litigasi adalah kelanjutan dari *e-Court* yang sudah diberlakukan dari tahun 2018 untuk perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara. Dengan menambahkan satu fitur bernama *e-Litigasi*.

E-Litigasi secara singkat artinya persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara melaksanakan persidangan menggunakan laptop atau computernya. Cara ini diciptakan guna meminimalisir para pihak untuk datang ke kantor pengadilan juga mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.²⁵

²³ Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/elektronik>, 2016

²⁵ Nahliya Purwantini, Afandy, Beny K Heriwanto, *Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Dipengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 27, No. 8, Januari 2021, hlm 1118, diakses 23 Maret 2021 13:55.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi dan informasi dan komunikasi.²⁶ Selanjutnya didalam pasal (4) juga menjelaskan bahwasanya persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses dengan cara penyampaian gugatan/ pemohon/ keberatan/ bantahan/ perlawanan atau intervensi/beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan/penetapan²⁷

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa persidangan secara elektronik (e-litigasi) merupakan penyederhanaan dalam beracara dipengadilan yang dapat mengurangi interaksi antara pihak berperkara dengan aparaturnya pengadilan, yang mana penerapan e-litigasi terbukti dapat memangkas waktu, biaya, dan juga tenaga yang harus dikeluarkan oleh para pihak, karena mulai dari pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan persidangan, penyampaian salinan putusan, dan upaya hukum dapat dilakukan dimana saja secara online melalui media elektronik. Sehingga untuk melakukan proses peradilan dirasa lebih menjadi mudah, efektif, dan efisien sesuai harapan masyarakat.

²⁶ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, Pub.L.No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 (2019) Pasal 1 Ayat (7).

²⁷ *Ibid*, Pasal 4

C. Mekanisme Persidangan *e-Litigasi*

Sebagaimana diketahui bahwa dasar hukum yang menjadi landasan dari pelaksanaan persidangan online mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Adapun secara umum mekanisme yang diterapkan adalah majelis hakim berada di ruang sidang, sedangkan kuasa hukum berada di area pengadilan dan jaksa maupun saksi berada di kantor kejaksaan. Sementara itu terdakwa sendiri masih berada di lembaga permasyarakatan. Lebih lanjutnya lagi dalam mekanismenya semua pihak menggunakan perangkat elektronik, baik untuk melakukan jawab-jinawab maupun *e-litigasi*.

Pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online. Saat ini khusus untuk advokat. Pengguna terdaftar perlu melakukan pendaftaran dan mendapatkan akun melalui mekanisme validasi advokat oleh pengadilan tinggi tempat dimana advokat disumpah. Sedangkan pendaftaran dari perseorangan atau badan hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan penjelasan singkat pendaftaran perkara online dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengguna terdaftar dan pengguna lainnya

Advokat selaku pengguna terdaftar dan para pencari keadilan (non advokat) selaku pengguna lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara diseluruh pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat akan mendaftar perkara baru. Pada dasarnya pengguna ini termasuk pengguna *e-court temporary* dan pengguna *account* untuk pengguna insidental hanya berlaku untuk satu kali, yaitu saat beracara secara elektronik. Setelah 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari setelah tanggal putusan, user tidak bisa lagi mengakses data perkaranya. Untuk menggunakannya lagi harus dilakukan aktivasi kembali oleh pengadilan.²⁸

2. Pendaftaran Perkara (e-Filing)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah pihak yang bersangkutan terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI.²⁹

3. Taksiran Panjar Biaya (e-Skum)

Dengan melakukan pendaftaran online menggunakan *e-court*, pendaftaran secara otomatis akan mendapatkan taksiran panjaran biaya dan nomor pembayaran (*virtual account*) yang dapat dibayar melalui saluran elektronik (*multichannel*) yang tersedia.³⁰

4. Mendapatkan Nomor Perkara

Setelah pendaftaran melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja,

²⁸ Masyhudi Dan Sigid Suseno, *Sidang Virtual, Idealis, Peluang, Tantangan, Dan Implementasinya*, (Jakarta: Buku Kompas, 2021), Hlm 50.

²⁹ *Ibid*, hlm, 51

³⁰ *Ibid*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian aplikasi *e-court* akan memberikan notifikasi bahwa perkara sudah terdaftar dipengadilan.³¹

5. Pemanggilan Pihak Secara Online (*e-Summons*)

Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik kealamat *email* para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *e-court*.³²

6. Persidangan Secara Elektronik (*e-litigasi*)

Aplikasi mendukung persidangan secara elektronik sehingga pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan dapat pula dilakukan secara elektronik.³³

7. Salinan Putusan Secara Elektronik (*e-Salinan*)

Aplikasi ini memuat informasi putusan diantaranya adalah tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutas, dan salinan putusan elektronik yang dapat diunduh.³⁴

8. Tanda Tangan Elektronik (*e-Sign*)

Penandatanganan berkas salinan putusan secara elektronik.

D. Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (*e-litigasi*) Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Layanan persidangan secara elektronik merupakan layanan baru yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI di empat lingkungan peradilan yang

³¹ *Ibid,*

³² *Ibid,*

³³ *ibid,*

³⁴ *Ibid,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berada dibawahnya, termasuk Peradilan Negeri. *e-litigasi* itu sendiri merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program induk bernama *e-Court* (Elektronik Court). Fitur yang dilakukan dalam e-litigasi ini bersifat teknis yudisial yaitu teknis yang mempersingkat proses jawab-menjawab, pemeriksaan alat bukti, dan pembacaan putusan kepada para pihak. Sedangkan fitur lain seperti pendaftaran perkara secara online (*e-Filling*), pemanggilan secara online (*e-Summons*), dan pembayaran secara online (*e-Payment*) itu dilakukan dalam fitur *e-Court*.

Prosedur penyelesaian perkara secara elektronik khususnya terkait dengan e-litigasi atau persidangan secara elektronik berlaku untuk semua perkara perdata diseluruh pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung, tak terkecuali di Pengadilan Negeri.

Tidak semua tahapan persidangan dilakukan dengan e-litigasi. Untuk sidang pertama tetap dilangsungkan didalam ruangan sidang pengadilan pada hari, tanggal, dan jam kerja yang telah ditetapkan. Jika kedua prinsipal hadir pada sidang pertama, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana ketentuan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak hal-hal yang menjadi agenda sidang adalah:

- a. Pengguna terdaftar dan pengguna lain menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.
- b. Ketua majelis menawarkan kepada tergugat untuk beracara secara elektronik namun jika tergugat diwakili oleh kuasa hukum maka persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan.
- c. Ketua majelis dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait dengan persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak dan dilakukan setelah proses mediasi selesai.³⁵

Pada tahapan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dan para pihak datang pada sidang seperti biasa untuk menetapkan jadwal sidang atau *court calender* yang telah disepakati bersama.

Setelah tahapan mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka persidangan elektronik dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi persetujuan penggugat dan tergugat diberikan pada sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. persetujuan tersebut diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik.³⁶ Barulah dapat diterapkan e-litigasi. Adapun prosedur persidangan yang dapat dilakukan dengan penerapan e-litigasi adalah sebagai berikut:

³⁵ *Ibid*, Pasal 19

³⁶ *Ibid*, Pasal 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Court Calender

Secara bahasa *court calender* adalah kalender peradilan. Dalam proses secara manual *court calender* sering diposisikan sebagai tatanan hakim terhadap penerimaan perkara. *Court calender* ditulis sesuai dengan nomor perkara yang diterima oleh hakim, didalamnya merekam segala proses dan jadwal persidangan yang akan datang.

Dalam sistem persidangan elektronik, *court calender* lebih dimaknai sebagai jadwal dan agenda persidangan. Ketua majelis akan menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik.³⁷ Majelis hakim akan membacakan *court calender* dihadapan para pihak berperkara.

Para pihak memperhatikan terhadap *court calender* tersebut yang kemudian menyampaikan persetujuannya, persetujuan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan *court calender*. Kesepakatan ini tidaklah diatur didalam PERMA(Peraturan Mahkamah Agung), namun kesepakatan *court calender* yang secara formil telah disetujui pihak-pihak yang berperkara, akan membantu kelancaran persidangan.³⁸

2. Replik, Duplik dalam Sistem Informasi Pengadilan

Ketua majelis menetapkan jadwal persidangan untuk agenda penyampaian, replik dan duplik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Jadwal persidangan yang ditetapkan oleh ketua majelis

³⁷ *Ibid*, Pasal 21

³⁸ Aco Nur Dan Amam Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik Dipengadilan Agama*, (Sidoarjo:Nizamia Learning Center, 2019), Hlm, 135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui SIPP terintegrasi dengan *e-court*, sehingga para pihak dapat mengetahui jadwal dan agenda persidangan melalui *e-court*.

Para pihak wajib menyampaikan dokumen jawaban, replik, duplik sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Dokumen yang disampaikan oleh para pihak harus dalam format pdf atau rtf/doc. Para pihak yang tidak mengirimkan dokumen elektronik sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka sidang ditunda satu kali. Namun apabila para pihak tidak memiliki alasan yang sah maka demi hukum dapat disimpulkan bahwa para pihak tidak menggunakan haknya untuk itu dan proses persidangan akan dilanjutkan dengan agenda lain.

Setelah menerima dokumen elektronik yang di kirim oleh para pihak, majelis hakim memeriksa dokumen tersebut melalui *e-court*. Dokumen elektronik yang belum di verifikasi oleh majelis hakim tidak dapat di lihat oleh pihak lawan. Setelah majelis hakim selesai memeriksa dokumen tersebut, maka majelis hakim memverifikasi dokumen tersebut melalui menu yang telah tersedia pada *e-court*.

Dokumen elektronik akan terkirim kepada lawan seiring dengan majelis hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan. Panitera pengganti wajib mencatat semua aktifitas persidangan secara elektronik pada berita acara sidang elektronik.³⁹

³⁹ Mahkamah Agung RI, Op. Cit, Pasal 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemeriksaan Alat Bukti

Pemeriksaan alat bukti surat dalam e-litigasi dilaksanakan secara double chek system mengingat alat bukti surat dianggap sangat menentukan perkara perdata. Double chek system artinya pemeriksaan dilakukan melalui dua tahap, yaitu pemeriksaan secara online (*soft file*) dan pemeriksaan dokumen aslinya secara fisik.

Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.⁴⁰ Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermatrai kedalam akun *e-court* yang dimilikinya. Surat asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa dimuka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh majelis hakim.

4. Pemeriksaan Saksi Dan Ahli Dalam *e-Litigasi*

Pemeriksaan saksi dan ahli dalam e-litigasi dapat dilakukan melalui *teleconference*. Artinya para pihak dan saksi tidak perlu datang ke kantor pengadilan untuk melakukan pemeriksaan. Hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa semua pihak wajib terkoneksi dalam waktu dan media yang sama serta memperoleh informasi secara jelas sehingga keterangan saksi dan ahli dapat digali secara komprehensif oleh semua pihak.

Untuk pemeriksaan saksi/ahli dapat dilakukan dengan jarak jauh atas permintaan penggugat atau tergugat. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menggunakan infrastruktur pengadilan ditempat dilakukan

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan saksi/ahli tersebut. Saksi/ahli memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh ketua pengadilan setempat.

Persidangan untuk memeriksa saksi/ahli yang demikian harus didukung oleh media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi dalam persidangan. Biaya yang ditimbulkan dalam proses pemeriksaan yang demikian dibebankan kepada pihak penggugat atau tergugat yang menghendaki.⁴¹

5. Persidangan Tahap Kesimpulan

Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui e-court. Setelah majelis hakim menerima dan memeriksa dokumen tersebut maka majelis hakim melakukan verifikasi atas dokumen melalui menu yang telah tersedia pada *e-court*. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika majelis hakim menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.

6. Pembacaan Putusan

Putusan penetapan dibacakan oleh majelis hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan melalui aplikasi *e-court* pada jaringan internet publik, secara hukum, telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁴¹ *Ibid*, pasal 24

Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik kepada para pihak melalui *e-court* dalam format Pdf dengan dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan.

Apabila para pihak menghendaki maka pengadilan dapat memberikan salinan putusan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan tersebut dikenai biaya PNBP (Penerima Negara Bukan Pajak) yang dapat disetorkan secara elektronik. Salinan putusan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.⁴²

Bagan Tata Cara Persidangan Secara Elektronik

Jika para pihak yang berperkara setuju menggunakan e-litigasi, maka berikut ini tata cara persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut:



⁴² *Ibid*, Pasal 26

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam penyusunan skripsi. Fungsinya untuk mengetahui secara jelas bahwa dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema persidangan secara elektronik (e-litigasi), untuk itu perlu adanya penjelasan terhadap penelitian terdahulu dengan harapan dapat memberikan kemudahan dalam memahami penelitian yang dilakukan peneliti. Selain itu penelitian terdahulu tersebut dapat menunjukkan keorisinalitasan karya ilmiah. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian pertama, skripsi yang ditulis oleh Akhmad Wildan Alfarizi mahasiswa universitas islam maulana malik ibrahim yang berjudul” Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi Di Pengadlan Agama Kabupaten Malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menurut pandangan hakim Pengadilan Agama yakni memberikan kemudahan bagi pencari keadilan serta majelis hakim dalam proses pengiriman dokumen yang lebih cepat, pengguna layananpun tidak terbatas pada jasa advokat, tetapi perorangan bisa mengurus sendiri dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam persidangan secara elektronik di pengadilan agama kaupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

malang kurang maksimal dikarenakan pihak pencari dan advokat belum sepenuhnya siap. Beberapa kekurangan antara lain kurang maksimalnya proses mediasi oleh hakim majelis⁴³.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah mengenai fokus pembahasan atau objek penelitian. Peneliti memfokuskan pada pelaksanaan persidangan secara elektronik dan kendala yang dihadapi dalam persidangan elektronik. Sedangkan penelitian sebelumnya terletak pada pandangan hakim tentang pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

2. Penelitian kedua, skripsi yang ditulis oleh Muchammad Razzy Kurnia, mahasiswa universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta yang berjudul "Pelaksanaan E-Litigasi Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakrta Pusat". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan memberi pemahaman mengenai pelaksanaan elitigasi serta dampaknya dalam pelaksanaan elitigasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat⁴⁴.

Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan e-litigasi sedangkan perbedaannya adalah skripsi terdahulu tidak menjelaskan kendala adanya pelaksanaan e-litigasi di pengadilan dan tidak memberikan studi kasus

⁴³ Akhmad Wildan Alfarizi, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Persidangan Secara Elektronik Dlam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Skripsi: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2019.

⁴⁴ Muchammad Razzy Kurnia, *Pelaksanaan E-Litigasi Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara spesifik dan hanya menjabarkan secara umum. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pelaksanaan e-litigasi serta kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Negeri Bangkinang.

3. Penelitian ketiga skripsi yang ditulis oleh Nurkholis mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019 dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Dipengadilan Secara Elektronik Studi Di Pengadilan Agama Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim pengadilan agama surabaya terhadap penerapan peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik serta untuk meninjau apakah peraturan ini sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Tetapi ada beberapa rangkaian yang belum diterapkan misalnya belum adanya menu templet bagi jurusita untuk memanggil pihak secara elektronik dan pelayanan sistem ini masih menggunakan jasa advokat⁴⁵.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada fokus kajian atau objek penelitian, secara umum penelitian terdahulu di atas menjelaskan tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas lebih spesifik terkait persidangan secara elektronik. selanjutnya lokasi penelitian yang ditulis oleh Nurkholis dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di Pengadilan

⁴⁵ Nurkholis, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Dipengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Agama Surabaya), Skripsi UIN Malang, 2019

Negeri Bangkinang. Terkait dengan informan penelitian saat ini peneliti memfokuskan wawancara terhadap Majelis Hakim, Panitera Muda, dan pihak yang berperkara, sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Nurkholis hanya mewawancarai hakim saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan judul Pelaksanaan *e-Litigation* di Pengadilan Negeri Bangkinang Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Bangkinang belum semuanya dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yaitu secara e-litigasi, ada beberapa pelaksanaan yang belum di lakukan secara e-litigasi yaitu pemeriksaan alat bukti dan pemeriksaan saksi itu di lakukan secara langsung (*offline*), hal itu di lakukan karena pemeriksaan saksi dan alat bukti harus di lakukan secara langsung karena saksi harus di sumpah secara langsung. sedangkan proses replik, duplik, tahap kesimpulan, dan tahap pembacaan putusan sudah di laksanakan sesuai dengn PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
2. Adapun kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di pengadilan negeri bangkinang adalah terkait dengan sistem yang belum baik, di lihat dari SDM TI serta sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan kurang bebas dalam memberikan pendapat dalam

persidangan dikarenakan waktu yang telah ditentukan, gugup dan kurang percaya diri, kesulitan dalam membayar biaya panjar serta surat kuasa tidak didaftarkan ke pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, terdapat beberapa hal sebagai masukan untuk meningkatkan khazanah keilmuan mengenai Pelaksanaan *e-Litigation* di Pengadilan Negeri Bangkinang Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam hal ini saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kualitas SDM perlu di tingkatkan dalam menghadapi teknologi baik dari internal pengadilan maupun eksternal pengadilan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana terkait dengan e-litigasi
3. Dan bagi yang ingin meneliti selanjutnya di sarankan untuk meneliti penelitian yang serupa pada mahasiswa lainnya, sehingga dapat menambah data mengenai pelaksanaan *e-litigation* di Pengadilan Negeri menurut PERMA nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja
- Arifin, Zainal. 2016. *Hukum Acara Perdata DiIndonesia*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Arsyad, Azhar. 2011. *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hajar. M, 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika,
- Herdiansyah Haris. 2013. *Wawancara Observasi dan Focus Grop Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawalipers
- Maru Hutagalung, Shopar. 2019. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Masyhudi Dan Sigid Suseno. 2021. *Sidang Virtual, Idealis, Peluang, Tantangan, Dan Implementasinya*. Jakarta: Buku Kompas.
- Mulyana Dedy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya..
- Nur, Aco. Dan Amam Fakhrrur. 2019. *Hukum Acara Elektronik Dipengadilan Agama*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center
- Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Soekanto, Soeryanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: UI Press. Grafindo Persada
- Soeryono Soekanto, Soeryono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 6. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Waluyo, Bambang .2008. *penelitian hukum dalam praktek*, cetakan ke- 4, Jakarta:Sinar Grafik

Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dan Kehakiman

Mahkamah Agung RI. 2019. *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, Pub.L.No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894

Surat edaran Mahkamah No. 6 Tahun 1992 Tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Artikel atau Internet

Gelombang Online dalam Perkembangan Hukum. 2019. www.mahkamahagung.go.id

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-E-Litigation-oleh--rafli-f-achmad/>

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/51525/2020/03/25/pengadilan-negeri-bangkinang-sidangan-perkara-secara-online#sthash.luXOGIPo.dpbs>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2016. <http://kbbi.web.id/elektronik>

Nahliya Purwantini, Afandy, Beny K Heriwanto, 2021. *Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Dipengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 27, No. 8.

Akhmad Wildan Alfarizi, 2019. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Persidangan Secara Elektronik Dlam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muchammad Razzy Kurnia. 2018. *Pelaksanaan E-Litigasi Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Nurkholis. 2019. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Dipengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadlan Agama Surabaya)*, Skripsi UIN Malang



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

Pelaksanaan *E-Litigation* Di Pengadilan Negeri Bangkinang Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

1. Wawancara

Berikut daftar pertanyaan wawancara yang peneliti lakukan kepada responden:

- a. Kapan di laksanakan e-litigasi di Pengadilan Negeri Bangkinag?
- b. Perkara apa saja yang di terapkan menggunakan e-litigasi di pengadilan negeri bangkinang?
- c. Dalam waktu perma no 1 tahun 2019 di turunkan, sudah berapa perkara yang berhasil di laksanakan menggunakan e-litigasi di Pengadilan Negeri Bangkinang?
- d. Apakah sudah di lakukan sosialisasi tentang e-litigasi ini? Dimana? Sasarannya siapa?
- e. Apakah sarana dan prasarana yang mendukung jalannya e-litigasi di Pengadilan Negeri Bangkinang sudah memadai?
- f. Bagaimana kendala/hambatan dalam pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Negeri Bangkinang?
- g. Bagaimana pelaksanaan replik, duplik yang di lakukan di Pengadilan Negeri Bangkinang?
- h. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan alat bukti yang di lakukan di Pengadilan Negeri Bangkinang?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- i. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan saksi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bangkinang?
- j. Bagaimana pelaksanaan tahap kesimpulan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bangkinang?
- k. Bagaimana pelaksanaan tahap pembacaan putusan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bangkinang?

2. Observasi

- a. Mengamati secara langsung pelaksanaan e-litigasi di pengadilan negeri bangkinag.
- b. Mengamati dan berinteraksi dengan Majelis Hakim Dan Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Bangkinang

3. Dokumentasi

- a. Dokumentasi tentang jumlah majelis hakim dan panitera muda Pengadilan Negeri Bangkinag.
- b. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 6 Mei 2021



Wawancara dengan Pihak yang Berperkara di Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 6 Mei 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 6 Mei 2021



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39033
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2374/2021 Tanggal 23 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

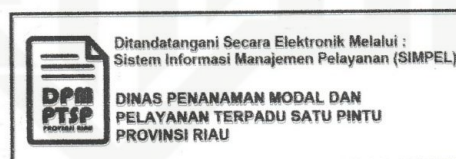
- | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | ABDUL ARKAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11720714852 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN E-LITIGATION DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PEESIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PENGADILAN NEGERI BANGKINANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Februari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/244

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/39033 tanggal 24 Februari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : ABDUL ARKAN |
| 2. NIM | : 11720714852 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN E-LITIGATION DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK |
| 8. Lokasi | : PENGADILAN NEGERI BANGKINANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 16 Maret 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,


ONNITA, SE
Penata Tk. I
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/244

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39033 tanggal 24 Februari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | ABDUL ARKAN |
| 2. NIM | : | 11720714852 |
| 3. Universitas | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN E-LITIGATION DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK |
| 8. Lokasi | : | PENGADILAN NEGERI BANGKINANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

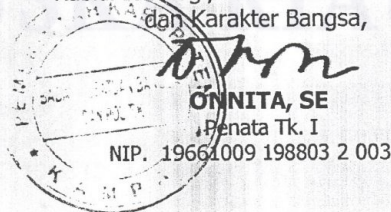
1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 16 Maret 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Pengadilan Negeri Bangkinang di Bangkinang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jl. Letnan Boyak No.77 Bangkinang Kode Pos 28412 Kab. Kampar Prop. Riau

Telp. (0762)20043 Fax. (0762)20043

Website: www.pn-bangkinang.go.id Email: pn_bkn@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W4.U7/1865 /HK03.V/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama : ABDUL ARKAN;

NIM : 11720714852;

Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU;

Jurusan : ILMU HUKUM;

Jenjang : S-1 Hukum;

Judul Penelitian : PELAKSANAAN E-LITIGATION DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DIPENGADILAN NEGERI BANGKINANG;

Lokasi : Pengadilan Negeri Bangkinang;

Telah selesai melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 17 Mei 2021 dengan judul **PELAKSANAAN E-LITIGATION DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DIPENGADILAN NEGERI BANGKINANG;**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 20 Mei 2021

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
PANITERA



M. JAMALIS, SH.
NIP. 19631223 198303 1 003

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru;
- ② Yang Bersangkutan;
3. Arsip;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan e-litigation di Pengadilan Negeri Bangkinang menurut peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik**, yang ditulis oleh :

Nama : Abdul Arkan
NIM : 11720714852
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H. Maghfirah, M.Ag

Sekretaris
Basir, SH., MH

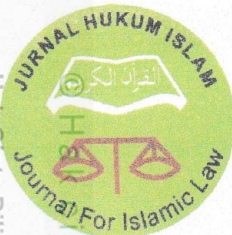
Penguji I
Rudiadi, SH., MH

Penguji II
Dr. Muhammad Darwis.SH, MH

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : ABDUL ARKAN

NIM : 11720714852

JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL : PELAKSANAAN E-LITIGATION DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINSTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Pembimbing: Muslim, S.Ag. SH. M.hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 09 Juli 2021

Dr. Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP PENULIS

ABDUL ARKAN, Penulis lahir di Pekanbaru pada tanggal 03 Oktober 1997 merupakan anak ke dua dari lima bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Habiburrahman, S.Pd dan Sulasmah, SP.d, Pada tahun 2004, penulis mulai menegap dunia Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 015 Kuntu. Lulus pada tahun 2010. Setelah itu, pada tahun 2010 penulis melanjutkan Pendidikan di MTs Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang (PPDN-TB), dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah (MA) Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang (PPDN-TB) dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2017, pada tahun yang sama berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan Pendidikan Strata-I (S-1) tepatnya di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2021.

Berkat rahmat dan karunia Allah Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul, “ **Pelaksanaan e-litigation di Pengadilan Negeri Bangkinang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik**”, dibawah bimbingan langsung Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 1 Juli 2021, Penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum(SH).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.